

Analisis implementasi kebijakan tentang label pangan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan di Jakarta dan Semarang tahun 2017 = Analysis of policy implementation on food labelling on micro, small, and medium food enterprises (MSME) in Jakarta and Semarang 2017

Ida Farida, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20477023&lokasi=lokal>

Abstrak

Label pangan memiliki peranan yang penting dalam memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk pangan. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya menjamin keamanan pangan melalui pencantuman informasi yang benar dan jelas pada label pangan antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal dan masih banyak ditemukan pelanggaran label khususnya produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan label pangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan stakeholder melalui wawancara mendalam serta fokus grup diskusi FGD. Dilakukan content analysis untuk menyimpulkan fenomena tematik yang dilengkapi dengan observasi terhadap 12 produk UMKM di Jakarta dan 7 produk UMKM di Semarang sebagai bentuk triangulasi untuk menjaga validitas data. Analisis diperdalam dengan framework implementasi kebijakan Edward III meliputi empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil observasi terhadap label UMKM pangan mendapatkan produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan TMK di Jakarta 91,6 dan Semarang 85,7 dengan pelanggaran tertinggi adalah tidak tercantumnya keterangan kode produksi. Rendahnya penerapan kebijakan label pangan antara lain disebabkan kurangnya dukungan pemerintah sehingga membatasi frekuensi sosialisasi, alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasi juga memengaruhi koordinasi lintas sektor yang menyebabkan rendahnya keberhasilan program pengawasan dan pembinaan UMKM pangan. Penerapan kebijakan label pangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang belum berjalan optimal yang dibuktikan dengan masih tingginya pelanggaran terhadap pencantuman keterangan pada label. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat frekuensi komunikasi, alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasi serta koordinasi lintas sektor agar proses implementasi kebijakan oleh UMKM pangan baik di Jakarta maupun Semarang dapat berjalan optimal. Kata kunci: Implementasi kebijakan, label pangan, UMKM pangan.

.....Food labels have an important role in affecting consumer decisions when purchasing a product. The government has set various policies in an effort to ensure food safety through correct and clear labelling, including Law No. 18 of 2012 on Food, Government Regulation No. 69 of 1999 on Food Labelling and Advertisement, and Head of National Agency for Drug and Food Control Regulation No. 27 of 2017 on Food Product Registration. However, implementation of these policies is not optimal and many violations occur especially in Micro, Small, and Medium Food Enterprises MSME. This research is aimed analyzing

the factors that affect the implementation of foodlabelling policies in food MSME in Jakarta and Semarang. This is a qualitative study aimed at identifying stakeholder views through in depth interviews and Focused Group Discussions FGD . Content analysis was performed to determine the thematic phenomena, completed with observation of 12 MSME products in Jakarta and 7 products in Semarang as a form of triangulation to maintain data validity. Analysis was detailed by framework implementation of Edward III policy which includes four variables that affect the implementation of a policy ndash communication, resources, disposition, and bureaucracy structure. Observations of MSME food labels revealed major violations in Jakarta 91.6 and Semarang 85.7 as production codes were not printed on the labels. This low rate of policy implementation was caused by the lack of government support which limited socialization frequency, resource allocation, monitoring and evaluation that also affected coordination across sectors that caused a low success rate of the monitoring and maintenance program for food MSME. Implementation of food labeling policies in food MSME in Jakarta and Semarang is not optimal as proven by the high rate of violations towards items to be posted on food labels. Therefore, the government should enhance the frequency of communication, resource allocation, monitoring and evaluation, as well as coordination across sectors to ensure optimum implementation of the policy in Jakarta and Semarang

Key words Implementation of policies, food labelling, food MSME